

SUDAH DAPAT PERSETUJUAN PUSAT

Mekanisme Pengisian Jabatan ASN Diubah

YOGYA (KR) - Pemda DIY berencana untuk membentuk talent pool sebagai basis data ASN yang dianggap potensial guna mengisi beberapa jabatan yang kosong. Talent pool merupakan sekumpulan data karyawan atau calon karyawan yang memiliki bakat dan potensi untuk direkrut ataupun mendapatkan jenjang karir dalam sebuah instansi. Seandainya hal itu nantinya benar-benar dilakukan pola

rekrutmen pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong akan diupayakan untuk diubah dari metode seleksi terbuka menjadi konsep talent pool.
"Kami sudah diberikan izin oleh pusat untuk menerapkan pola rekrutmen dengan berbasis talent pool. Untuk itu secara bertahap kami akan menurunkan tensi rekrutmen dengan pola seleksi terbuka menjadi talent pool. Dimana konsep talent

pool merupakan strategi yang cocok diterapkan dalam pola rekrutmen pegawai dengan kualifikasi khusus," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Yogyakarta, Jumat (5/7).
Menurutnya, ASN yang memenuhi kualifikasi, syarat, uji kompetensi internal akan dimasukkan dalam database tersebut dan kemudian hari jika Pemda DIY membutuhkan tinggal memanggil pejabat yang cocok.

Dengan cara itu adanya jabatan yang dirangkap bisa diselesaikan.
Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

DIY Amin Purwani menyatakan, Pemda DIY memetakan jabatan ASN yang akan kosong ke depannya. Tindakan itu dilakukan karena masa

pensiun sudah menjadi semacam siklus yang pasti akan terjadi.
Meski begitu tetap untuk memetakannya tetap mem-

butuhkan proses. Begitu pula dalam rekrutmen ASN baru pada sebuah jabatan yang tengah kosong juga membutuhkan waktu. **(Ria)-f**

DIKLAT 3-IN-1 DIIKUTI 200 PESERTA

Cetak Tenaga Kerja Siap Bersaing di Era Industri

YOGYA (KR) - Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Anggota Komisi VII DPR RI Drs HM Gandung Pardiman MM dan Kementerian Perindustrian RI kembali menggelar pelatihan vokasi industri berbasis sistem 3-in-1. Pelatihan kali ini untuk industri garmen, furnitur dan produk kulit, diikuti 200 peserta (generasi muda/milenial) dan akan berlangsung selama 14 hari.

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Yuna Pancawati selaku Asisten II Setda DIY Bidang Per-

ekonomian dan Pembangunan mengatakan, dalam dinamika global yang serba cepat, pendidikan vokasi tidak hanya menjadi pilar penting tapi juga jantung untuk memacu produktivitas dan inovasi.
"Pelatihan vokasi ini adalah langkah yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di DIY, sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. DIY memiliki potensi yang cukup besar untuk menyumbang tenaga kerja yang terampil dan kompeten yang siap bersaing di era industri 4.0 dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis tek-

nologi," katanya di sela acara pembukaan di Yudhistira Hall JEC, Jumat (5/7).
Turut hadir antara lain, Masrokhani (Kepala Badan Pengembangan SDM Industri Kementerian Perindustrian) yang sekaligus membuka secara resmi pelatihan, Saiful Bahri (Kepala Pusat Pendidikan & Pelatihan SDM Industri Kementerian Perindustrian) dan Kunto Purwo Widagdo (Kepala BDI Yogyakarta).
Anggota Komisi VII DPR RI Drs HM Gandung Pardiman MM berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar jumlah peserta diklat 3-in-1 di DIY bisa terus bertambah. Menurutnya, diklat ini sangat penting untuk mencetak tenaga kerja terampil siap kerja, yang akan berkontribusi mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di DIY. "Dalam diklat ini, peserta dilatih, memperoleh sertifikat kompetensi dan langsung ditempatkan bekerja di industri, saya harap semua peserta bersungguh-sungguh dalam belajar dan bekerja," kata Ketua DPD Partai Golkar DIY ini. **(Dev/Ira)-f**



KR-Devid Permana

Pembukaan pelatihan vokasi industri berbasis sistem 3-in-1.



TAK SEMATA DIBEBANKAN MELALUI APBD

Kawal Realisasi Sepuluh Proyek Strategis Daerah

YOGYA (KR) - Memasuki pertengahan tahun pekerjaan fisik yang masuk dalam sepuluh proyek strategis mulai direalisasikan. Kalangan dewan akan tetap menjalankan fungsinya dalam mengawal realisasi tersebut agar sesuai baik dari aspek waktu, perencanaan hingga kemandirian.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Ririk Banowati Permanasari, mengungkapkan setiap tahun selalu ditetapkan proyek strategis yang disesuaikan dengan visi misi kepala daerah maupun kebutuhan mendesak masyarakat. "Untuk anggarannya selalu dibahas lebih dulu di Komisi C sebelum naik ke Badan Anggaran. Kami pun mendorong agar tidak selalu dibebankan pada APBD," jelasnya.

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra ini, jika proyek yang menelan biaya besar di Kota Yogyakarta selalu dibebankan pada APBD maka dari sisi kuantitas akan sulit dioptimalkan. Hal ini karena APBD di Kota Yogyakarta cukup terbatas dan cenderung lebih rendah dibanding kabupaten lain sementara aktivitas masyarakat sangat tinggi. Oleh karena itu perlu ada kolaborasi dengan pos anggaran lain seperti dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat maupun dana keistimewaan (danais) dari Pemda DIY.

Pada tahun ini hampir separuh



KR-Ardhi Wahdan

dari sepuluh proyek strategis berhasil memanfaatkan pos anggaran di luar APBD namun dikelola Kota Yogyakarta. Di antaranya ialah pembangunan Embung Taman Budaya Giwangsan Tahap II dan revitalisasi TPS3R Karangmiri yang mendapatkan alokasi dana. Kemudian pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral RSUD serta pembangunan Puskesmas Kraton dan Puskesmas Pakualaman yang dibiayai melalui DAK. "Ada lagi penataan kawasan kumuh di Terban

yang berkolaborasi antara DAK dan APBD. Sedangkan proyek strategis lainnya seperti peningkatan Jalan Gedongkuning sisi selatan, pembangunan gedung SMPN 10, perluasan gedung perabotan Dinas Arsip dan Perpustakaan serta saluran air hujan Giwangsan semuanya memanfaatkan APBD," urainya.

Ririk juga akan terus mendorong agar proyek strategis pada tahun depan kembali dikolaborasikan dengan DAK maupun danais. Upaya untuk mengakses pos anggaran di luar APBD pun harus sudah mulai dilakukan. Dengan harapan, ketika pembahasan anggaran di lembaga dewan untuk kebutuhan tahun depan maka akan lebih sistematis dan terarah. Sehingga APBD dapat lebih leluasa mengakomodir kegiatan atau program non fisik yang menyangkut hajat masyarakat.

Di samping itu pengawasan yang dilakukan oleh tim eksekutif atas setiap progres perkembangan proyek strategis harus dipastikan sesuai perencanaan. "Proyek strategis itu kan juga dipayungi oleh peraturan walikota, maka jangan sampai meleset dari perencanaan. Apalagi setiap proyek strategis selalu berhubungan dengan pelayanan masyarakat dari sisi kesehatan, pendidikan, kebudayaan serta sarana penunjang ekonomi," imbaunya. **(Dhi)-f**



Kawal Arah Kebijakan Hingga Keberpihakan Ekonomi Lokal



KR-Ardhi Wahdan

Susanto Dwi Antoro menyampaikan rekomendasi Pansus RPJPD.

YOGYA (KR) - Memasuki masa akhir jabatan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2019-2024, dua rancangan peraturan daerah (raperda) berhasil dituntaskan sekaligus. Keduanya ialah raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta raperda terkait perubahan kelembagaan Perumda Bank Jogja menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda). Kini tu-

gas selanjutnya ialah mengawal arah kebijakan Kota Yogyakarta hingga keberpihakan terhadap ekonomi lokal sesuai rekomendasi yang telah disampaikan ke eksekutif.

Penuntasan kedua raperda tersebut seiring dengan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif melalui sidang paripurna yang digelar Kamis (4/7) lalu. Naskah hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh panitia khusus (pansus) lantas

diteruskan ke Gubernur untuk kepentingan evaluasi serta nomor register sebelum dijadikan lembaran hukum daerah berupa perda.

Juru Bicara Pansus Raperda RPJPD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro, mengungkapkan selama pembahasan pihaknya berhasil merumuskan sejumlah catatan. Setidaknya terdapat enam aspek yang menjadi perhatian. Di antaranya berkaitan dengan arah kebijakan dan isu-isu strategis. Meski sudah dilakukan identifikasi secara makro oleh tim eksekutif untuk jangka waktu 20 tahun namun masih perlu mendapatkan solusi dan prioritas penyelesaian pada masa mendatang. "Seperti misalnya isu strategis di bidang pendidikan kaitannya dengan anak putus sekolah. Jangan hanya dilihat dari aspek ekonominya saja tetapi sosialnya juga. Kemudian kenakalan remaja yang menjurus pada tindakan kriminal, tentunya instansi pendidikan tidak bisa lepas tangan," urainya.

Begitu pula isu strategis dan arah kebijakan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan stunting, angka pernikahan dini, kebutuhan hunian, penanganan sampah, transportasi, lalu lintas, parkir sampai jaminan kesehatan. Pada masa mendatang hingga 20 tahun ke depan sesuai arah RPJPD, berbagai persoalan tersebut dibutuhkan kebijakan yang mampu menjadi solusi penanganan.

Ditambah lagi dengan era disrupsi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya hal itu telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat dan memiliki dampak dari sisi positif maupun negatif. Adanya fenomena seperti judi online, prostitusi online,

game online hingga pinjaman online merupakan isu sosial ekonomi dan budaya yang tidak bisa dikesampingkan. "Perubahan sosial ekonomi dan budaya 20 tahun ke depan akan semakin cepat dan dinamis sehingga perlu diantisipasi dengan baik," ungkap Susanto Dwi Antoro.

Oleh karena itu pihaknya selaku tim pembahasan Raperda RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 memberikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh tim eksekutif. Rekomendasi itu antara lain penyusunan program pembangunan harus mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah dituangkan dalam RPJPD. Selain itu perlu ada kajian dan kebijakan yang memungkinkan kelas khusus guna mengatasi permasalahan kenakalan remaja. Literasi digital juga perlu menjadi perhatian khusus agar perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan.

Sementara terkait dengan raperda perubahan kelembagaan Bank Jogja, meski itu merupakan amanat dari regulasi yang lebih tinggi namun akan berdampak signifikan terhadap operasional bank milik Pemkot. Pasalnya ketika masih menjadi perumda maka orientasinya lebih pada aspek pelayanan umum. Sedangkan ketika sudah menjadi perseroda maka sektor bisnis justru menjadi urusan utama. Akan tetapi penguatan terhadap ekonomi lokal tidak bisa dikesampingkan.

Seperti dijabarkan Juru Bicara Pansus Raperda Perseroda Bank Jogja, Oleg Yohan, perubahan bentuk badan hukum tersebut seharusnya dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar terhadap perekonomian daerah di Kota



KR-Ardhi Wahdan

Oleg Yohan menyampaikan rekomendasi Pansus Bank Jogja.

Yogyakarta. Salah satunya dapat diwujudkan dengan memperluas akses keuangan kepada masyarakat dan mendorong pembiayaan usaha mikro kecil menengah secara lebih efisien dan efektif. "Keberpihakan terhadap ekonomi lokal itu bisa dialokasikan subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM dan koperasi di Kota Yogyakarta tentunya dengan mempertimbangkan kinerja Bank Jogja dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah," katanya.

Tim pansus, imbu Oleg, juga merekomendasikan agar Bank Jogja segera menyusun perencanaan, mengelola, dan menghimpun besaran subsidi bunga pinjaman secara profesional. Hal ini agar subsidi tersebut dapat diakses oleh UMKM dan koperasi yang tepat sasaran dan akuntabel. Pihaknya di lembaga dewan juga akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan guna memastikan rekomendasi tim pansus benar-benar dijalankan. **(Dhi)-f**



KR-Ardhi Wahdan

Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Dhan Novitasari menandatangani persetujuan bersama.



KR-Ardhi Wahdan

Pj Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto menandatangani persetujuan bersama.